

SEJARAH KERAJAAN PAGARUYUNG:

Tanggapan Terhadap Karya Zusneli Zubir dan Undri, *Sejarah Kerajaan Pagaruyung* (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah, 2019)*

Oleh

Nopriyasman

(Dosen Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas,

E-mail: nopriyasman@yahoo.com)

*

Kerajaan Pagaruyung di Minangkabau mengandung magnet tersendiri dalam khasanah pemikiran dan kebijakan politik daerah, terutama magnet integratif bagi bersatunya kembali masyarakat Minangkabau dengan pemerintah pusat Jakarta, pasca peristiwa pemberontakan PRRI. Bukankah Istana megah yang dibangun tahun 1976 telah menjadi simbol kemashuran Minangkabau ? Dijadikannya istana Pagaruyung sebagai simbol memberi penampakan kepada kita, betapa masa lalu kerajaan itu dimaknai sebagai harmonisasi bersatunya kembali anak bangsa sehabis perang saudara yang terjadi pada tahun 1958-1961. Faktor integrasi itu dicarikan kepada jalan sejarah, misalnya dengan cara mengaitkan dengan Raja Pagaruyung Adityawarman, putra dari Dara Jingga (Putri Melayu) dengan bangsawan dari Jawa (Majapahit) Adwayawarma (Muljana, 1966: 20). Dengan demikian, secara matrilineal dan patrilineal, Adityawarman direpresentasikan sebagai keturunan Minangkabau, dan juga sekaligus keturunan Majapahit (Jawa). Salah dua yang berjasa mengangkat kembali simbol kerajaan dan menghidupkan dunia kerajaan baru Pagaruyung itu pada era kontemporer adalah Harun Zein, dan Azwar Anas (keduanya pernah menjadi Gubernur Sumatera Barat).

*Makalah Tanggapan disampaikan dalam kegiatan “Uji Petik Sejarah Kerajaan Pagaruyung” di Aula Dinas Pendidikan Kota Padang, Bagindo Azis Chan, Padang pada tanggal 30 November 2019.

Ketika Istana Basa Pagaruyung selesai dibangun dan difungsikan untuk publik sejak tahun 1985, maka berbagai prosesi anugerah gelar, upacara adat, dan seterusnya mulai berlangsung di lingkungan istana tersebut. Istana juga menjadi tempat berhimpunya *urang gadang* Minangkabau. Sejalan dengan itu, simbol-simbol kebesaran dieksiskan dalam praktik budaya, pakaian kebesaran, gelar, dan peran Istana dalam adat Minangkabau. Fenomena ini, kemudian menjadi cikal bakal “politik kewangsaan”, dalam mengintegrasikan tradisi budaya Minangkabau di bawah Payung Pagaruyung (politik adat) setelah Orde Baru berakhir. Setelah keluarnya Permendagri No. 39 Tahun 2007, maka “politik kewangsaan Pagaruyung” mendapat tempat dalam praktik sosial politis di Sumatera Barat. Di samping itu, Istana Pagaruyung muncul sebagai pusat informasi adat, budaya, dan sejarah, dan bahkan menjadi identitas terkait budaya Minangkabau yang *adiluhung* yang ikut menyumbang bagi kebudayaan nasional.

Fenomena “kebaruan” di lingkungan keturunan Kerajaan Pagaruyung kontemporer tersebut disebut Klinken sebagai upaya “penggalian kembali” entitas kerajaan tersebut yang sudah lama hilang, bahkan sejak runtuhnya kerajaan Pagaruyung setelah Perang Paderi (1803-1837), yang berimbas kepada “pelenyapan” kaum bangsawan Pagaruyung (Klinken, 2010:169), yang dikenal dengan peristiwa “Koto Tangah” pada tahun 1809. Dalam peristiwa tersebut, Yang Dipertuan Minangkabau Sultan Muningsyah terpaksa hidup di daerah pengungsian di Kuantan (Mansoer, dkk., 1970: 124; Radjab, 1964). Ketika Belanda sudah berkuasa di Minangkabau, Sultan ditawari Belanda untuk kembali menduduki singgasananya, namun Sultan Muningsyah menolak tawaran itu.

Kedudukan Raja Pagaruyung baru ada lagi, setelah Belanda Mengangkat Sultan Alam Bagagarsyah menjadi “raja” Pagaruyung atau *Hoofdregent* Minangkabau. Tingkatan jabatan itu pun kembali diturunkan Belanda menjadi hanya *Regent van Tanahdatar* (Asnan, 2008: 11). Maka sejak itu, praktis apa yang digambarkan dalam kata pusaka orang tua-tua dahulunya, yaitu ”Biang akan tembus, genting akan putus, keputusan tertinggi terpulang kepada Raja Alam di Pagaruyung”, tidak berfungsi apa-apa lagi (Hamka, 1982, 153). Hal ini tentu saja mengecewakan Sultan Alam Bagagarsyah, dan menyatukan kembali orang

Minangkabau yang terpecah antara kelompok paderi dan non-paderi untuk bersama-sama melawan penjajahan Belanda. Akibatnya, Sultan Alam Bagagarsyah ditangkap Belanda, dan cerita tentang aktivitas pewaris kerajaan pun menghilang di pentas sejarah. Baru kemudian muncul lagi pada era kemerdekaan tahun 1970, ketika pembicaraan terkait pemikiran perlunya Alam Bagagarsyah menjadi pejuang bangsa, sampai kemudian hadirnya Taufik Thaib pada tahun 2002 sebagai Yang Dipertuan Pagaruyung kontemporer.

**

Terkait kepada penggalian kembali kesultanan atau kerajaan oleh kaum intelektual Minangkabau sejak tahun 1970-an itu, maka kehadiran hasil penelitian Zusneli Zubir dan Undri ini tentu punya kerberartian tersendiri. Secara fenomenologis, judul “Sejarah Pagaruyung” yang disematkan oleh penulisnya menampakkan realitas perjalanan kerajaan itu jauh di kelampauan, sekaligus memberi makna, baik bagi masyarakat (khususnya blok historis Pagaruyung), pemerintah, maupun untuk dunia referensi tertulis atau dunia tulis menulis di Sumatera Barat. Artinya Zusneli Zubir dan Undri telah membuat sejarah dalam upaya menghadirkan kembali Kerajaan Pagaruyung itu ke pentas sejarah dan memperkaya semangat intelektualisme di Sumatera Barat.

Kedua penulis termasuk orang yang kreatif dan produktif dalam melahirkan berbagai artikel dan buku. Oleh sebab itu, karyanya ini dapat dianggap sebagai sumbangan konkrit mereka di bidang sejarah. Penelitian mereka menjadi berarti karena selama ini cerita tentang Pagaruyung tidak banyak dikenal masyarakat, dan kalau toh ada, lebih banyak tersebar dan terpenggal pada beberapa karya yang tidak bersifat komprehensif. Hal ini pula yang menjadi latar belakang kedua penulis meneliti kembali sejarah kerajaan Pagaruyung (lihat Bab D). Pada bagian pertama laporan hasil penelitiannya itu, kedua penulis juga ingin meyakinkan pembaca, bahwa penelitiannya berbeda dengan para peneliti terlebih dahulu, salah satu bentuk perbedaan itu adalah pengungkapan Kerajaan Pagaruyung dan kerajaan-kerajaan dalam panji Kerajaan Pagaruyung. Dua hal itu

menjadi titik berangkat untuk menghadirkan sejarah kerajaan ini kembali dalam khasanah kesejarahan di Sumatera Barat.

Zusneli Zubir dan Undri, peneliti dan penulis dari BPNB sesungguhnya punya latar belakang keilmuan sejarah. Sebagai sejarawan mereka telah berupaya mengumpulkan berbagai sumber lokal, dokumen-dokumen dan publikasi-publikasi yang berguna bagi penelitiannya. Rentang waktu yang diambil dalam perspektif jangka panjang, mulai dari kehadiran Adityawarman di Sumatera sampai kepada Sultan Alam Bagagarsyah, yang pada dekade pertama tahun 2000-an pernah diusulkan untuk memperoleh gelar “pahlawan nasional” oleh masyarakat Tanah Datar bersama pemerintah. Dengan demikian, karya Zusneli Zubir dan Undri memperlihatkan kepada pembaca sebagai sebuah potret umum dari peran tokoh-tokoh garis keturunan kerajaan dalam sebuah sistem yang dibangun Pagaruyung. Paparannya mengalir dalam logika penusisnya sendiri. Hal ini masuk akal juga, sebab untuk mengenal dinamika yang berkembang dalam abstraksi pemikiran orang tentang Pagaruyung masa kini, tidak bisa tidak harus mengembalikannya kepada perjalanan sejarah dan peran-peran yang pernah dipraktikkan oleh kerajaan itu pada masa lalu.

Bagaimanakah perjalanan Pagaruyung sebelum dan sesudah perkembangan Islam di Minangkabau ? Hal ini pokok persoalan yang hendak dicarikan jawabannya oleh Zusneli Zubir dan Undri. Jawaban itu ditempatkan dalam bagian kedua, yang memperlihatkan tentang kejayaan Pagaruyung, terutama masa Adityawarman. Dalam bab ini dapat ditemukan jejak-jejak kesejarahan dari Pagaruyung, yang dalam urainnya banyak bersandarkan kepada peninggalan purbakala (arkeologi), misalnya arca, prasasti, dan juga buku-buku yang pernah melaporkan terkait peninggalan kesejarahan Pagaruyung tersebut. Kisah kejayaan Adityawarman dimasukkan dalam sub bab pertama dari keseluruhan Bab II ini. Sub lainnya dalam Bab II adalah berbicara tentang “Raja Alam Minangkabau di Pagaruyung” dan “Raja Alam Minangkabau di Pagaruyung Pada Masa Islam”. Dua sub bab ini, secara jujur diakui oleh kedua penulis diambil dari karya M. Nur dan kawan-kawan, yang berjudul “Perjuangan Sultan Alam

Bagagarsyah Dalam Melawan Penjajagan Belanda di Minangkabau Pada Abad ke-19 (lihat halaman 22-37).

Dalam Bab III, ketika pembicaraan diarahkan kepada “Struktur dan Sistem Pemerintahan Kerajaan Pagaruyung”, model “mengumpulkan bacaan” dan kemudian memindahkannya ke dalam sub bagian penelitian kita kembali muncul, khususnya pada sub 3.1. Asal usul Keluarga, yang juga diambil dari tulisan M.Nur, dan kawan-kawan (sebanyak 9 halaman). Tentu saja yang dilakukan penulis ada juga dilakukan oleh para penulis lainnya, namun sebaiknya diberi pengantar dulu yang berisi penjelasan isi dari karangan yang dikutip tersebut sambil memberikan catatan di sana sininya. Pada sub bab lainnya, kedua penulis menampilkan cerita tentang sanak saudara dari Sultan Alam Bagagarsyah, yaitu Puti Reno Sori, Tuan Gadih Tembong, Tuan Bujang Nan Bakundi, dan Yang Dipertuan Batuhampar. Setelah itu barulah diceritakan mengenai struktur Kerajaan Pagaruyung, yang dimulainya dari penjelasan tentang Rajo Tigo Selo, Basa Ampek Balai, Yang Dipertuan gadis, kemudian ahli waris dan keturunan dari Sultan Alam Bagagarsyah. Pada bagian ini, kedua penulis cukup berhasil, namun terkesan satu sudut pandang saja, yaitu blok historisnya Taufik Thaib. Dalam realita perjalanan sejarah Pagaruyung, ada blok historis keturunan Pagaruyung yang lain yang mengklaim diri juga mempunyai garis atau silsilah raja Pagaruyung, misalnya Sultan Muchdan Taher Bakrie, yang juga telah menulis buku berdasarkan versinya pula (Padang Ekspres, 30 April 2015; dan 29 Mei 2015; Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher bakrie Gelar Sultan Alam Bagagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau, 2016). Penjelasan terhadap kedua kelompok yang bersaing ini tentu bermanfaat bagi pemahaman keadaan sejarah Pagaruyung masa kini. Setidaknya, penulis memakai juga sumber dari pihak yang berseberangan. Kalau toh, satu kelompok muncul dominan, secara argumentatif dapat dibenarkan.

Sebagaimana yang diuraikan pada Bab I, bahwa sebagai pembeda dari tulisan yang pernah hadir sebelumnya adalah penulis meneliti tentang Kerajaan-kerajaan di bawah Panji Pagaruyung. Soalan ini dijelaskan pada Bab IV, yang dimulai dari realitas hidup berkerajaan setelah masuknya Islam. Ada sebanyak 18

kerajaan di bawah panji Kerajaan Pagaruyung yang sempat diuraikan dalam bab ini, mulai dari Kerajaan Sungai Tarab sampai Cangking dan Ulakan. Untuk yang tersebut terakhir, meskipun tidak disebut oleh penulis sebagai kerajaan, namun sebagai kesatuan teritorial dia mempunyai hubungan dekat dengan Pagaruyung. Penting dicatat Zusneli Zubir dan Undri berpendapat bahwa:

Kerajaan Pagaruyung dianggap sebagai yang diutamakan, bukan yang menentukan... sejak awal kampuang dan nagari ... merasa berasal dari ... Pagaruyung, yakni Pariangan Padang Panjang. Malah ada yang berpendapat, raja Adityawarman di Pagaruyung tidak pas, karena dia tidak murni Minangnya. Hubungan dengan Pagaruyung bukan hubungan takluk tetapi sebagai hubungan anggota keluarga yang jauh. Bagi daerah rantau, di luar Luhak nan Tigo, hubungan itu akan terasa lebih unik, karena ... di daerah yang baru mereka mengembangkan permukiman baru yang mereka sebut sebagai kerajaan, pada hal sebenarnya di daerah Luhak, itu hanyalah merupakan nagari biasa (halaman 71).

Pada bab V, Zusneli Zubir membicarakan “Hubungan Antara Raja-Raja yang ada di bawah Panji Pagaruyung dengan Raja Pagaruyung”. Menurut kedua penulis, hubungan itu tergambar dalam jalinan istilah berupa *Sapih Balahan*, *Kuduang Karatan*, *Kapak Radai*, *Timbang Pacahan*. Kemudian dilanjutkan dengan Bab VI, dibawah topik bahasan “Akhir dari kerajaan-Kerajaan di Bawah Panji Kerajaan Pagaruyung”. Penguraian Bab ini baru satu sub-bab, yaitu “Wafatnya Sultan Alam Bagagrsyah”. Ada baiknya dibuatkan pula satu sub, yang khusus menganalisis soal mengapa kerajaan Pagaruyung itu tidak bisa bangkit lagi sejak kolonial Belanda bercokol di Minangkabau, sehingga relevan dengan judul bab yang ditampilkan. Meskipun begitu, tampaknya penulis percaya bahwa sultan Alam bagagrsyah sebagai raja terakhir dari Pagaruyung, setelah itu tidak ada lagi. Mungkin itu pulalah sebabnya, penulis tidak melanjutkan penelitian mengenai polemik-polemik di sekitar keturunan dan raja Pagaruyung tersebut. Kalau saja penulis juga mengungkapkan kelanjutan dinamika di sekitar perjalanan keturunan kerajaan ini, hingga situasi kontemporer, maka tentu akan lebih menantang, dan menambah ketertarikan orang untuk menambah pengetahuan tentang sejarah kerajaan ini lebih jauh.

Bagaimanapun, hasil penelitian Zusneli Zubir dan Undri ini, terlepas dari kekuatan dan kelemahannya, telah memberi informasi yang berguna bagi pemahaman sejarah Kerajaan Pagaruyung. Kegunaannya tidak saja bisa menjadi pembangkit suasana dan nuansa kehidupan berkerajaan di Minangkabau, apalagi bila dihubungkan dengan kepentingan pariwisata Sumatera Barat, yang tidak kalah pentingnya dapat merangsang menghidupkan dunia tulis menulis di Sumatera Barat pada masa kini dan masa datang. Apalagi di daerah rantau sekarang, ada upaya pelestarian situs peninggalan sejarah dan budaya kerajaan di kelampauan, sebagai suatu kompleks yang dapat dimanfaatkan untuk wisata pendidikan, wisata religi, dan sebagainya. Berbagai peninggalan sejarah dan budaya memiliki muatan informasi, kreasi, imajinasi, dan ekspresi yang mampu sebagai penarik orang berkunjung ke daerah mereka. Salah satu Kabupaten yang sedang giat membangun wisata kerajaan ini adalah Dharmasraya, yang dalam catatan sejarah, sebelum bernama Kerajaan Pagaruyung, Adityawarman pernah menjadi raja di Kerajaan Melayu Dharmasraya (1347). Keadaan itu terjadi sebelum dipindahkannya pusat kerajaan ke dataran tinggi Minangkabau (Nopriyasman, 2019: 3). Apakah karya Zusneli Zubir dan Undri ini akan memberi warna baru kajian sejarah kerajaan di Minangkabau, atau sebaliknya, maka peran penulis-penulis sejarah kerajaan berikutnya yang akan memanfaatkan kata-kata kunci yang telah ditampilkan oleh kedua penulis ini. Sebagai penutup, apa yang dilakukan kedua peneliti dan penulis pantas dihargai sesuai porsinya, apalagi sudah penelitian yang dilakukan yang menurut mereka sudah melalui tahapan metode sejarah. Semoga pengungkapan sejarah dan potensi kesejarahan masa lampau daerah ini semakin meluas di Sumatera Barat. Semoga !

DAFTAR BACAAN

- Asnan, Gusti. 2008, "Penjajahan Belanda di Sumatera Barat dan Migrasi Orang Minangabau ke Tanah Semenanjung", dalam Asnan, Gusti dan Zulkarnain, (Ed). 2008. *Persembahan 70 Tahun Prof. Suwardi MS Mengabdikan pada Ilmu dan Profesi Sejarah Demi Daerah dan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Duli Yang Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Muchdan Taher bakrie Gelar Sultan Alam Bagagarsyah Daulat Yang Dipertuan Raja Pagaruyung Minangkabau, 2016
- Hamka, 1982. *Dari Perbendaharaan Lama*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Mansoer, M.D., dkk. 1970. *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bharatara.
- Muljana, Slamet. 2008. *Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LkiS.
- Nopriyasman, 2019. "Menghadirkan Tonggak Sejarah: Upaya pelestarian Situs Candi Pulau sawah di kabupaten Dharmasraya", dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Induk Pelestarian (RIP) Situs Candi Pulau Sawah di Ruang Pertemuan Hotel Sakato Jaya, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 25 November*.
- Padang Ekspres*, 30 April 2015; dan 29 Mei 2015;
- Radjab, Muhammad. 1956. *Perang Paderi di Sumatera Barat (1803-1838)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Van Klinken, Gerry. 2010. "Kembalinya Para Sultan: Pentas Gerakan Komunitarian dalam Politik Lokal", dalam Davidson, Jamies S., dan David Heley, Sandra Moniaga (Eds.). 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia.
- Zubir, Zusneli. 2019. "Sejarah Kerajaan Pagaruyung", *Draft Awal Laporan*. Jakarta: Kemindukbud, Direktorat jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah.

Padang, 30 November 2019

NP